

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Masyarakat Melayu

Batu Bara merupakan sebuah kawasan daerah yang terletak di pantai timur Sumatera. Wilayahnya bersandingan dengan Kabupaten Asahan. Meskipun wilayah keduanya berdekatan, Batu Bara memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dengan Kabupaten Asahan. Pada dasarnya memang semua daerah itu memiliki ciri khas adat istiadat yang berlaku pada masyarakatnya. Perbedaan itulah yang menjadikan budaya daerah menjadi bagian dari keserasian dalam bingkai pemersatu bangsa.

Dengan unsur dan jenis budaya dari suku-suku bangsa di Indonesia yang meskipun sangat variatif, kita bisa mengetahui seseorang berasal dari Aceh, Batak, Melayu, Mandailing, Minang, Jawa, Makasar, Ambon atau yang lainnya melalui perilaku dan latar belakang budaya masing-masing. Kesemuanya dipersatukan melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan Pancasila sebagai kepribadian sekaligus dasar dan falsafah Negara.

Masyarakat Batu Bara identik dengan suku Melayu dalam perilaku keseharian mereka. Baik dari bentuk simbol adat kedaerahan dan juga religiusitas di masyarakat Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara sebelum pemekaran menjadi kabupaten sendiri merupakan bagian dari gabungan kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Walaupun demikian, sebelum dan sesudah pemekaran menjadi sebuah kabupaten sendiri, budaya masyarakat Batu Bara lebih mengedepankan identitas etnik Melayunya, sehingga orang lebih mengenal dengan Batu Bara sebagai suku Melayu.

Melayu di Kabupaten Batu Bara memiliki persinggungan dengan budaya lain. Hal ini membuktikan bahwa kebudayaan adalah superstruktur dari nilai-nilai yang didukung oleh organisasi sosial pada suatu landasan materil yang sesuai, sehingga membentuk suatu konfigurasi, suatu kerangka dasar yang mana sektor-sektor lainnya mendapat bentuk atau suatu *Gestalt* di mana bagian-bagiannya mendapat makna atau suatu *Geist* yang memberikan

kesatuan kepada pikiran dan perasaan.

Presensi kelompok-kelompok etnik dalam masyarakat pluralis dapat memicu kerjasama (*collaboration*) dan akomodasi (*accommodation*) maupun konflik (*conflict*) yang dapat menimbulkan *schisme* ataupun proaksi baru yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap bentuk interaksi atau relasi antar kelompok. Hal ini dapat terjadi karena adanya identitas kelompok etnik (*ethnic group identity*) dan nilai-nilai kultural bersama yang diterima secara holistik oleh anggota kelompok untuk membedakannya dengan kelompok lain. Atas dasar tersebut kesetiakawanan kelompok (*ethnic group based solidarity*) maupun kesadaran kelompok etnik dapat meningkat.

Sistem nilai budaya dan orientasi nilai budaya yang terpatri dan menjelma dalam sikap, mentalitas serta prilaku anggota kelompok, akan menimbulkan penerimaan (*acceptance*) dan penolakan (*defence*) keanggotaan kelompok. Hal tersebut disebabkan karena munculnya rasa keinginan yang sama dalam bentuk kepercayaan, asal-usul keturunan, mitos-mitos, bahasa dan kepentingan yang bersama.

Melayu Batu Bara yang terletak pada kawasan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu masyarakat yang terbilang kaum dan turun-temurun mendiami kawasan pantai timur Sumatera Utara. Pada umumnya mereka menggunakan bahasa Melayu, beradat-istiadat Melayu dan beragama Islam. Di tambah lagi dengan kearifan lokal masyarakat Melayu Batu Bara seperti halnya dengan setiap acara adat seperti perkawinan, sunatan rasul dan upacara-upacara lainnya yang biasanya diiringi dengan berpantun. Dan sampai sekarang berpantun masih tetap populer dan dimanfaatkan dengan baik oleh warga masyarakat karena tradisi ini mengandung aspek-aspek yang menunjukkan kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Melayu. Jika lokal genius hilang atau musnah, kepribadian bangsa pun memudar. Kearifan lokal merupakan pembentuk identitas yang inheren sejak lahir. Kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan; kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri dan

kearifan lokal mampu meningkatkan martabat Bangsa dan Negara.

Kuatnya tali silaturahmi masyarakat Melayu Batu Bara, menjadikan masyarakat tersebut berguna bagi siapa saja, sehingga orang asing yang ingin bertemu Datuk mudah untuk menemukannya. Dalam tradisi lisan, penyampaian dari penduduk biasanya menggunakan bahasa daerah setempat dapat terlihat pada acara perkawinan, syukuran, dan upacara-upacara ritual.

Masyarakat Batu Bara saat ini masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, nilai adat-istiadatnya, serta bertutur lemah lembut, baik dalam berkata maupun berbuat sehingga memperkuat tali silaturahmi.

Banyaknya identitas atau ciri khas dari perilaku dan simbol masyarakat Batu Bara menjadikan sebuah kekuatan kelompok yang solid dalam melakukan keinginan yang baik untuk kemajuan daerah. Tinggal bagaimana melestarikan budaya lokal masyarakat Batu Bara sehingga dapat tetap berlangsung kepada generasi selanjutnya.

B. Karakteristik Masyarakat Melayu

Walaupun etnik Melayu secara kependudukan merupakan urutan kedua setelah etnik Jawa di Batu Bara, namun bagi masyarakat Batu Bara, Melayu adalah identitas dominan di Batu Bara. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai bentuk interaksi dan pola perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi ketika dilihat dari beberapa bentuk kegiatan seperti dalam acara pemerintahan maupun acara perkawinan. Masyarakat merupakan bentuk dari interaksi antar individu. Interaksi sosial adalah sebuah interaksi antarpelaku, dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka, atau yang membuat mereka berinteraksi. Mead memandang interaksi sosial dalam masyarakat terjadi dalam dua bentuk utama, yakni percakapan isyarat (interaksi non- simbolis) dan penggunaan simbol-simbol penting.

Dalam berbagai realitas, manusia sebenarnya banyak sekali terlibat dalam interaksi non-simbolis, ketika mereka merespon dengan cepat dan tanpa sadar satu sama lain. Seperti

gerakan badan, ekspresi dan nada suara. Sedangkan ciri-ciri interaksi simbolis adalah pada konteks simbol, sebab mereka mencoba mengerti makna atau maksud dari suatu aksi yang dilakukan satu dengan yang lain.

Perilaku masyarakat Melayu Batu Bara dalam melakukan aksi sosialnya di tengah masyarakat sering kali mendapat respon dan reaksi yang baik dari masyarakat di sekitarnya. Perilaku tersebut merupakan bentuk dasar dari ciri mereka yang lebih dikenal dengan orang yang ramah, sopan santun, selalu menghormati yang lebih tua, tata bahasa yang tersusun rapi jika sedang melakukan komunikasi dan suka merendahkan. Dengan banyaknya bentuk interaksi yang mereka lakukan, baik itu melalui kontak langsung maupun dengan media lainnya, mereka lebih cepat mendapat kabar dan berita dari orang dan tersebar kepada orang lain, karena pada umumnya masyarakat Melayu Batu Bara suka menggunakan bahasa daerah dan suka bercerita.

Kebiasaan masyarakat Melayu Batu Bara dalam aktivitas dan kegiatan bersama seperti halnya dalam bentuk pengajian dan perkumpulan lainnya sering melakukan debat dan diskusi terhadap suatu permasalahan yang ada. Mereka suka berdiskusi antara satu dengan yang lain. Bentuk interaksi itulah yang sampai sekarang mengakar pada pola kehidupan sehari-hari. Kaum pria dan wanita biasanya sama saja dalam melakukan aktivitas dalam banyak diskusi ketika sedang melakukan perkumpulan, baik itu dalam pesta perkawinan, sunatan, perwiratan dan acara-acara lainnya yang menjadi sebuah tradisi yang selalu melekat dalam konstruksi budaya Batu Bara.

Pola interaksi dalam masyarakat yang berkelanjutan akan menjadi sebuah kebiasaan dan kebudayaan bagi perilaku masyarakat setempat. Sebab, unsur-unsur dalam kebudayaan itu di antaranya ialah bahasa, seni, ilmu pengetahuan, organisasi sosial dan lain sebagainya. Kemudian bentuk interaksi yang dilakukan pada umumnya dalam kegiatan adat-adat Melayu yang mengandung nilai budaya bagi mereka. Identitas bagi masyarakat Melayu Batu Bara tersebut dapat dipandang dengan adanya sebuah interaksi yang dinamis antara konteks sejarah

dan konstruksi masyarakat Batu Bara.

Perbedaan suku ternyata tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Batu Bara untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Pola hubungan antara kelompok- kelompok kesukuan di Batu Bara telah mampu menciptakan suasana yang demokratis dan harmonis. Pemahaman dalam perbedaan etnis di Batu Bara menjadi modal dasar dalam terbentuknya kerukunan antar masyarakat. Pola interaksi dan relasi sosial yang dibangun oleh sebuah masyarakat Batu Bara telah bergantung pada faktor kondisional dan upaya- upaya yang dilakukan untuk membangun hubungan antar suku yang berbeda. Ditambah lagi dengan pola hidup yang saling membutuhkan dan ketergantungan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan masyarakat dan secara terus menerus interaksi tersebut tumbuh secara alamiah dan terus menerus.

Secara genealogis, orang Melayu Batu Bara berbeda dengan Asahan. Pernyataan ini diyakini oleh orang Batu Bara ketika melihat historis kedatangan nenek moyang ataupun leluhur mereka ke daerah Batu Bara. Orang Batu Bara berasal dari keturunan Minangkabau yang melakukan perjalanan sampai ke wilayah tersebut melalui sungai Kampar, sedangkan orang Asahan adalah Melayu yang berasal dari percampuran etnik Aceh dan Batak.

Genealogis tersebut dibuktikan dengan tidak adanya “marga” pada orang Batu Bara, dan walaupun ada setelah terjadinya percampuran dan adaptasi yang meluas terhadap peradaban budaya. Namun, orang yang bermarga di Batu Bara juga tetap mengikuti adat istiadat, bahasa dan perilaku yang sama dengan Melayu Batu Bara. Sementara marga di Asahan sejak masa lalu dihilangkan untuk dapat bertahan hidup di tanah Melayu. Namun sesungguhnya marga tersebut tetap melekat pada diri mereka sebagai sebuah identitas yang menunjukkan suatu asal keturunan. Sebab biasanya marga merupakan identitas yang melekat pada seseorang berdasarkan tali darah keturunan yang menjadi kesatuan pada kelompok tertentu.

Orang Batu Bara sering menyebutkan bahwa Melayu di Batu Bara adalah bersaudara.

Walaupun dengan kekeluargaan yang diperluas oleh keadaan biologisnya, namun pada akhirnya tetap menimbulkan ikatan kekeluargaan yang kuat antara satudengan yang lainnya. Dengan demikian sifat kekeluargaan mereka melahirkan ikatan kedaerahan. Orang melayu Batu Bara seluruhnya adalah bersaudara dan selalu bersandarkan pada sebuah markas besar yang disebut dengan Batu Bara.

Melayu menganggap bahwa sebagai orang yang beradat dan beragama Islam harus selalu menanamkan sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama manusia, tanpa melihat latar belakang yang ada. Sebab, Melayu bernuansakan Islam harus sejalan dengan syariat yang diajarkan dan harus sesuai pula dengan perilaku hidup sehari-hari. Oleh karenanya dalam perilakunya orang Batak dan etnik lain di Batu Bara menurut mereka masih dianggap bagian dari kebutuhan dalam bermasyarakat. Hubungan timbal balik dalam interaksi yang berlaku antara Melayu dan Batak dapat terikuti.

Adat istiadat yang digunakan etnik lain seperti etnik Batak dalam beberapa acara seremonial memang tetap menunjukkan ciri khas sesuai dengan adat dan budaya sesuai dengan leluhur dari para pewaris budaya mereka masing-masing. Namun sampai sekarang ini bagi etnik lain di luar etnik Melayu masih belum dapat mendominasi etnik mereka, bahkan mereka telah mampu dalam beradaptasi dengan budaya Melayu di Batu Bara.

Dalam hal politik bagi orang Melayu ada kekhawatiran dengan orang Batak dan Etnik lainnya, sebab mereka merasa dirugikan jika sistem pemerintahan dan seluruh kebijakan lebih di kuasai oleh orang yang bukan Melayu. Walau demikian bagi orang Batak atau etnik lainnya dapat menerima keberadaan etnik Melayu. Menurut mereka jika orang lain yang memimpin masyarakat Melayu, maka simbol-simbol kedaerahan di Batu Bara malah bisa berubah menjadi simbol-simbol Batak seperti gambar cicak di Polonia. Tanah Melayu harus tetap dipegang dan dipimpin oleh Melayu walaupun di beberapa satuan perangkat kerja daerah di pemerintahan masih banyak orang lain yang bukan Melayu. Hal tersebut di sebabkan karena sumberdaya

Manusianya masih belum memadai.

C. Perilaku Politik

1. Pengertian politik

Kata *politik* yang berasal dari bahasa latin sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Menurut kamus bahasa Inggris politik diartikan *politic* yang menunjukkan perbuatan.¹ Pandangan oleh masyarakat terhadap politik memiliki asumsi yang berbeda, tentu masyarakat dipedesaan dengan masyarakat diperkotaan memiliki cara pandang yang berbeda. Sarbaini, Harpani Matnuh, berpendapat bahwa cara pandang masyarakat dibedakan yang didasari oleh latarbelakang pendidikan, ekonomi, pekerjaan, cara berpikir dan perilaku masyarakat itu sendiri.² Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti yaitu: Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan yaitu ilmu politik.

Politik dalam kehidupan masyarakat mulanya dikenal pada masa Plato dalam bukunya yang berjudul “Politeia” yang pula dikenal dengan istilah “Republik” dan selanjutnya berkembang melalui karya Aristoteles, yang dikenal dengan “Politica”. Karya Plato maupun Aristoteles ini dipandang sebagai titik pangkal pemikiran politik dalam sejarah perkembangan, di mana hal itu dapat diketahui bahwa “politik” merupakan istilah dipergunakan sebagai konsep pengaturan masyarakat, sebab dalam kedua karya itu membahas soal-soal yang berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Politik dari Plato dan

¹ Harpani Matnuh dan Zainal Sarbaini, „Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala“, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5.9 (2015), 735–42.

² Burhanuddin Yusuf, „Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah (Kajian Atas Konsep Era Klasik)“, *Jurnal Aqidah-Ta*, 6.1 (2018), 114–30.

Aristoteles merupakan kata yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Kedua filsuf tersebut menekankan pembahasan tentang politik berkaitan dengan masalah pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.³ Upaya tersebut berhasil, maka politik memerlukan seperangkat alat atau unsur-unsurnya seperti menjalankan pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijakan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita hendak dicapai.

Prof. M. Amin Rais memberikan pengertian istilah “politik” itu meliputi hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan serta cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara. Menurut Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim menyimpulkan pengertian politik kepada dua kecenderungan. Pertama, yang defenisi yang mengaitkannya dengan negara atau urusan pemerintahan, dan yang kedua defenisi mengaitkannya dengan masalah otoritas atau kekuasaan.⁴ Prof. M. Amin Rais bertanya kepada salah seorang politikus yang juga seorang kiyai tentang alasan kepindahan sang tokoh dari satu partai ke partai lain yang sangat mungkin membuat bingung pengikutnya. Sang tokoh dengan santai menjawab bahwa politik itu kan urusan dunia, sementara urusan dunia itu hanya permainan saja.

Adapun politik dalam pandangan Islam adalah pengaturan urusan-urusan rakyat yang didasarkan kepada hukum-hukum Islam. Akan tetapi asumsi politik negatif dari beberapa masyarakat memberikan pandangan politik dikatakan buruk maka dalam kekeluarganya sampai dibatasi untuk tidak terjun ke dalam perpolitikan. Kenegatifan politik dipahami sebagai bidang kegiatan yang mengandung unsur-unsur kelicikan, hipokrisi, ambisi buta, penghianatan, penipuan dan sejumlah kata lainnya yang mengandung makna kurang terpuji. Jauh dari pandangan itu masih banyak hal positif dalam politik, maka dari itu dalam suatu aktifitas

³ Abd. Mu'in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 34.

⁴ Burhanuddin Yusuf, *Politik Dalam Islam: Makna, Tujuan Dan Falsafah* (Kajian Atas Konsep Era Klasik)", *Jurnal Aqidah-Ta*, 6.1 (2018), 32.

manusia harus totalitas bukan hanya sendagurau melainkan untuk menghindari asumsi negatif dari pada politik maka perlunya sosialisasi politik pada masyarakat.

Adapun hubungan antara politik dan Islam secara tepat digambarkan oleh Imam al-Ghazali: “Agama dan Kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”. Berbeda dengan pandangan Barat politik diartikan sebatas pengaturan kekuasaan, bahkan menjadikan kekuasaan sebagai tujuan dari politik. Akibatnya yang terjadi hanyalah kekacauan dan perebutan kekuasaan, bukan untuk mengurus rakyat. Hal ini bisa kita dapati dari salah satu pendapat ahli politik di barat, yaitu Loewenstein yang berpendapat “*politic is nicht anderes als der kamps um die Macht*” (politik tidak lain merupakan perjuangan kekuasaan).

2. Perilaku Pemilih

Menurut Firmanzah perilaku pemilih secara garis besar pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para konstantan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada konstantanbersangkutan.⁵

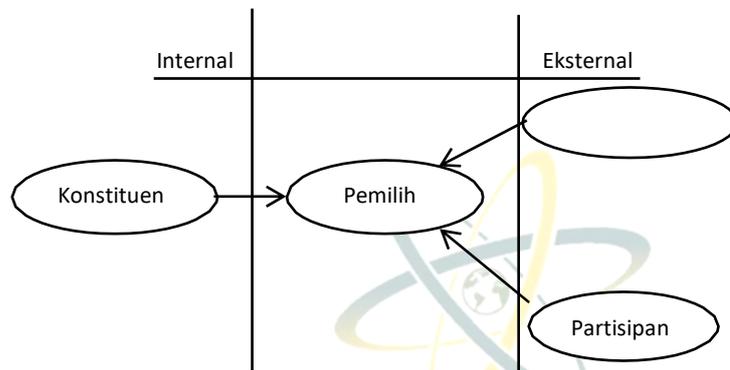
Sedangkan Menurut Nora pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara kontestan (partai politik, calon pemimpin) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan.⁶ Semakin efektif seseorang/suatu kontestan dalam menawarkan solusi yang tepat untu menjawab permasalahan, semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih para pemilih. Agar bisa diterima masyarakat, solusi yang ditawarkan harus memiliki kekuatan argumentatif dan didukung data-data yang tentunya akurat.

Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu

⁵ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 87.

⁶ Ghazaly Nora Amalia, *Ilmu Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 174.

yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Kelompok masyarakat ini adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik dilingkungan internal dan konstituen pendukung pesaing-pesaing dilingkungan eksternal.⁷



Sumber: Firmanzah, *Marketing Politik*, h.86

Menurut Adman Nursal ada beberapa pendekatan dalam pilihan politik untuk melihat perilaku pemilih, yakni sebagai berikut :

1) Pendekatan Sosiologis (Mazhab Colombia)

Pendekatan sosiologi atau yang dikenal Mazhab Colombia menurut Rooth, teori ini mengungkapkan determinasi perilaku memilih seseorang yang dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, agama, dan lingkungan sekitar. Sejalan dengan pendapat Affan Gafar preferensi pilihan pemilih berdasarkan pada karakteristik sosial individu yang bersangkutan. Penganut pendekatan ini lebih mengutamakan ikatan sosial dalam menentukan perilaku memilihnya. Ikatan sosial tersebut berupa, adanya persamaan dari segi etnik, ras, agama, keluarga, pertemanan yang dialami individu secara historis.⁸

2) Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

⁷ Firmanzah, *Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 86.

⁸ Yohana Apaut, Arry Bainus, Dede Sri Kartini, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015, (Jurnal TAPIS Vol. 14 No.02), 72.

Mazhab Michigan menggaris bawahi adanya sikap politik para pemberi suara yang menetap. Teori ini dilandasi oleh konsep sikap dan sosialisasi. Sikap seseorang sangat mempengaruhi perilaku politiknya. Sikap itu terbentuk melalui sosialisasi yang berlangsung lama, bahkan bisa jadi sejak calon pemilih masih berusia dini. Pada usia dini seorang calon pemilih telah menerima “pengaruh” politik dari orang tuanya, baik komunikasi langsung maupun pandangan politik yang diekspresikan orang tuanya. Sikap tersebut menjadi lebih mantap ketika menghadapi pengaruh berbagai kelompok acua seperti kelompok pekerja, kelompok pengajian dan sebagainya. Proses panjang sosialisasi politik atau organisasi kemasyarakatan lainnya. Ikatan seperti inilah yang disebut sebagai identifikasi partai, sebuah variabel untuk menjelaskan pemilih berdasarkan mazhab michigan.

3) Pendekatan Rasional

Pendekatan Rasional atau Rational Choice, pendekatan ini melihat perilaku memilih berdasarkan atas pemikiran yang rasional, memilih berdasarkan pada asas manfaat untuk dirinya. Dari sudut pandang pemilih rasional mereka menghitung bagaimana memperoleh keuntungan yang lebih tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Dalam sudut pandang ekonomi politik, pemilih rasional, individu sebagai warga tidak akan ikut memilih jika lebih menguntungkan bagi mereka karena mereka akan menikmati hasil yang sama dengan mereka yang memilih tanpa harus mengorbankan waktu dan tenaga untuk ikut memilih. Selain itu menurut Key⁹ pemilih lebih menentukan pilihannya secara prospektif, yaitu dengan melihat kinerja dari pemerintah yang berkuasa yang sudah berakhir mampu memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan pemerintahan sehingga akan dipilih kembali pada pemilu berikutnya sebaliknya apabila pemerintah tidak memberikan dampak yang positif bagi dirinya dan pemerintahan maka akan ditinggalkan dan tidak akan dipilih lagi pada pemilu selanjutnya.

⁹ Yohana Apaut, Arry Bainus, Dede Sri Kartini, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2015, (Jurnal TAPIS Vol. 14 No.02), 74.

Keputusan untuk memilih pada pemilihan umum lebih ditentukan pada sejumlah prestasi yang sudah diukir dari pemerintah pada saat berkuasa.

3. Orientasi Pemilih

Orientasi pemilih menurut Firmanzah membagi menjadi dua hal yang bisa dijadikan ukuran mengenai cara memilih dalam menilai kedekatannya dengan partai politik atau seorang konstan¹⁰. Dari kedua hal tersebut yakni:

1) Kesamaan mengenai cara pemecah masalah (*policy problem solving*)

Dalam hal ini pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi atas cara kontestan (partai politik maupun calon pemimpin) dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Semakin efektif seseorang/suatu konstanta dalam menawarkan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan, maka semakin tinggi pula probabilitas untuk dipilih oleh para pemilih. Para pemilih memiliki kecenderungan untuk tidak memilih partai politik atau calon pemimpin yang kurang mampu menawarkan program kerja dan hanya mengandalkan spekulasi serta jargon-jargon politik.

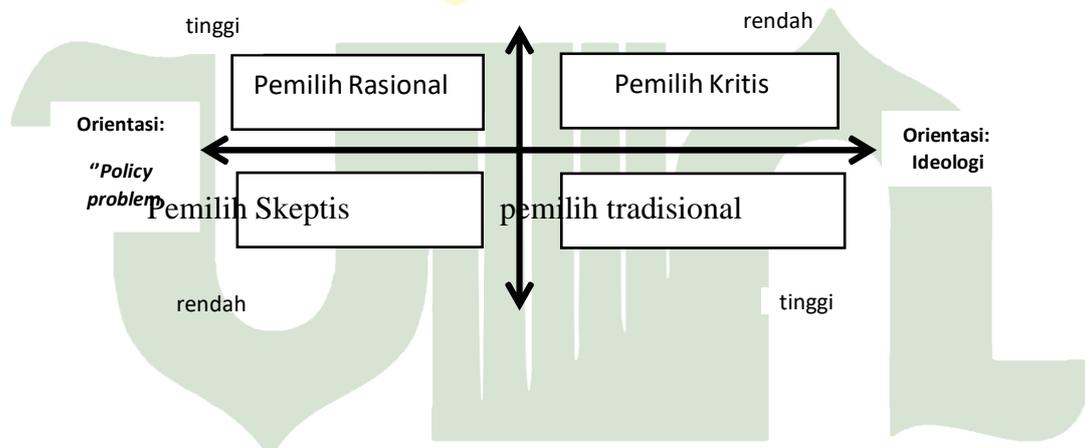
2) Kesamaan dalam paham serta nilai dasar ideologi (*ideology*)

Struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kandidat seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan suara mereka. Pemilih memiliki kecenderungan untuk memilih partai atau kandidat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka daripada partai politik atau kandidat yang memiliki ideologi yang berbeda. Terdapat beberapa hal yang digunakan partai politik atau kandidat dalam hal ini. Pertama, partai politik atau kandidat berusaha menarik masyarakat yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka. Kedua, partai politik atau kandidat berusaha memperkenalkan dan meyakinkan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak memiliki kesamaan ideologi dengan mereka.

¹⁰ Firmanzah, Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 99.

D. Jenis-Jenis Tipologi Pemilih

Menurut Firmanzah mengkaji tipologi pemilih dalam kontestasi pilwalkot/pilkada pemilih akan cenderung secara objektif memilih partai politik/kontestan calon yang memiliki kepekaan terhadap masalah dan kejelasan program.¹¹ jenis-jenis pada pemilih ini menggunakan orientasi pemilih tersebut untuk mengasumsikan penggunaannya oleh pemilih untuk menentukan pilihannya. Orientasi pemilih pada *policy-problem-solving* berkisar antara rendah (*low*) dan tinggi (*high*). Hal yang sama juga terdapat pada orientasi pemilih pada *ideology*, yakni berkisar dari intensitas rendah (*low*) dan tinggi (*high*). Konfigurasi dari kedua faktor tersebut dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Berdasarkan konfigurasi diatas pemilih tersebut terdapat ada empat jenis pemilih, yakni sebagai berikut :

1. Pemilih Rasional

Pemilih Rasional, ini memiliki orientasi yang cukup tinggi terhadap *policy-Problem-Solving* dan berorientasi rendah untuk faktor ideologi. Pemilih dalam hal ini lebih mengutamakan pada kemampuan partai politik atau calon peserta pemilu berdasarkan rekam jejak calon kandidat, karakteristik parpol/kandidat, dan program kerjanya, mereka melihat

¹¹ Bakran Suni, „Program Kerja Calon Kepala Daerah Dan Tipologi Pemilih Dalam Pilkada“, Jurnal Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 2, (2013), 106.

program kerja tersebut melalui kinerja partai atau kontestan dimasa lampau, dan tawaran program yang ditawarkan sang calon atau partai politik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang terjadi.¹²

2. Pemilih Kritis

Pada pemilih kritis ini, proses untuk menjadi jenis pemilih ini bisa terjadi melalui dua hal yaitu: pertama, jenis pemilih ini menjadikan nilai ideologis sebagai pijakan untuk menentukan kepada partai atau sang kontestan pemilu, kemana mereka akan berpihak dan selanjutnya mereka akan mengkritisi kebijakan yang akan atau yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, bisa juga terjadi sebaliknya di mana pemilih tertarik terlebih dahulu dengan program kerja yang ditawarkan oleh partai ataupun kontestan. Kemudian mencoba memahami nilai-nilai dan faham yang mendasari pembuatan sebuah kebijakan. Pemilih jenis ini adalah pemilih yang kritis, artinya mereka akan selalu menganalisa kaitan antara sistem partai ideologi dengan kebijakan yang dibuat.

3. Pemilih Tradisional

Pemilih jenis ini memiliki orientasi ideologi yang sangat tinggi dan tidak mengutamakan kebijakan partai politik atau seorang kontestan, sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan. Pemilih tradisional sangat mengutamakan kedekatan sosial, budaya, popularitas, asal-usul, paham dan agama sebagai ukuran untuk memilih sebuah partai politik atau kontestan pilkada. Kebijakan seperti ini yang berhubungan dengan masalah ekonomi, kesejahteraan, pendidikan dll, dianggap sebagai prioritas yang kedua. Pemilih jenis ini sangat mudah untuk dimobilisasi dari masa sosialisasi calon kontestan sampai dengan kampanye berlangsung, dan pemilih jenis ini juga memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Mereka menganggap apa saja yang dikatakan oleh seorang kontestan pemilu merupakan suatu

¹² <https://www.kompasiana.com/shulhan/54f84cc8a33311137e8b45d5/mengenal-tipologi-pemilih-dalam-pemilu?page=all>

kebenaran yang tidak bisa ditawar lagi.

4. Pemilih Skeptis

Pemilih Sekpsis, Jenis pemilih ini sangat kecil orientasi mereka pada ideologi maupun kibijakan partai/kandidat. Mereka tidak memperhatikan pada *platform* parpol, malas turut berpartisipasi dalam prosesi politik, dengan kata lain (sudah tidak percaya lagi dengan pemimpin). pemilih yang tidak memiliki orientasi ideologi yang cukup tinggi dengan sebuah partai politik atau kontestan pemilu, orientasi pada pemilih jenis ini juga tidak menjadikan sebuah kebijakan sesuatu hal yang penting. Walaupun mereka berpartisipasi dalam pemilu, itu biasanya karena mereka melakukannya secara acak atau random. Dengan keyakinan bahwa siapapun yang menjadi pemenang dalam pemilu, hasilnya ya sama saja, tidak ada perubahan yang berarti bagi kondisi daerah/negara.

Sedangkan menurut Nimmo ia mengemukakan ada empat tipe dalam pemberian suara pada pemilihan umum,¹³ yaitu sebagai berikut :

1. Tipe Rasional, pada tipe ini pemberi suara yang rasional merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinsic pada setiap karakter personal pemberi suara turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga negara.
2. Tipe Reaktif, yakni pemberi suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan calon kontestan politik.
3. Tipe Responsif, pada tipe ini pemberi suara mudah berubah-ubah atau tidak memiliki pendirian untuk menentukan hak pilihannya dengan mengikuti waktu peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat.
4. Tipe Aktif, yakni pemberi suara yang terlibat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai dan personalitas dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima serangkaian

¹³ Ghazaly Nora Amalia, *Ilmu Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), 174.

pilihan yang telah diberikan.

E. Faktor-Faktor Pilihan Politik

Memilih kandidat dalam pilwalkot, peranan individu mempunyaipengaruh yang cukup kuat. Menurut James Spradley, mengemukakan bahwa setiap individu dalam memutuskan sesuatu, pada umumnya dimulai dari sisi kognitif seseorang. Kognitif menurut ia adalah apa yang tetanam dalam benak seseorang yakni sesuatu yang dipercayain dan diterima sebagai sesuatu yang benar oleh seseorang ataupun komunitas tertentu atau masyarakat dalam budaya tertentu.

Sedangkan menurut Nursal mengemukakan gagasannya terkait dengan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih,¹⁴ yakni sebagai berikut :

1. *Social Imagery* atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial), *Social imagery* dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa pada kandidat politik. *Social imagery* dapat terjadi didasari oleh banyak faktor, antara lain:
 - A. Demografi
 - Usia
 - Gender
 - Agama
 - B. Sosio-Ekonomi
 - Pekerjaan
 - Pendapatan
 - C. Kultural dan Etnik
 - Kultural

¹⁴ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama 2014),70.

- Etnik
- Politis-Ideologi

2. Citra Kandidat (*Candidate Personality*), hal ini mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat yang baik. Beberapa sifat yang merupakan *Candidate Personality* adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegardan sebagainya.
3. Perasaan Emosional (*Emotional Feeling*), adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditujukan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
4. Identifikasi Partai, yaitu proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan dan sebagainya. Dengan mengidentifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan tetap. Dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama.
5. Isu dan Kebijakan Politik (*Issues dan Policie*), Komponen *Issues dan Policies* ini mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh pasangan calon kontestan politik jika menang pemilu. *Platform* dasar yang sering ditawarkan oleh pasangan calon kontestan politik kepada pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.
6. Peristiwa Mutakhir (*Currents Events*), hal ini mengacu pada perhimpunan peristiwa, isu dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Currents events* meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Masalah domestik misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan lain-lain yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.

7. Peristiwa Personal (*Personal Events*), hal ini mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu menjadi tokoh pada para perjuang, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan lain sebagainya.
8. Faktor-faktor Epistemik (*Epistemic Issues*), dalam hal ini merupakan isu-isu pemilihan yang spesifik dapat memicu pada keinginan pemilih terhadap tentang hal baru. *Epistemic issues* sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN